Heboh Video Amien Rais Soal Presiden Prabowo Dihapus, Komdigi: Itu Hoaks!

Category: NASIONAL
written by Redaksi | May 2, 2026



SEANTERONEWS.com – Unggahan video Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, yang menyinggung Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya resmi diturunkan. Berdasarkan pantauan pada Sabtu (2/5/2026) pagi, video berjudul "JAUHKAN ISTANA DARI SKANDAL MORAL" tersebut sudah tidak lagi menghiasi kanal YouTube Amien Rais Official.

Langkah penghapusan ini terjadi setelah Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, memberikan pernyataan tegas bahwa konten tersebut merupakan informasi bohong atau hoaks.

Pemerintah menilai video berdurasi sekitar delapan menit yang diunggah pada Kamis (30/4/2026) itu telah melampaui batas kebebasan berekspresi. Dalam pernyataan resminya, Meutya Hafid menegaskan bahwa isi video tersebut mengandung unsur fitnah,

ujaran kebencian, serta serangan personal yang merendahkan martabat kepala negara.

Tudingan Konten: Komdigi menegaskan isi video adalah hoaks, fitnah, dan mengandung ujaran kebencian.

Isi Video: Amien Rais sebelumnya menyinggung kedekatan Presiden Prabowo dengan Seskab Teddy Indra Wijaya yang dianggap melampaui batas profesional.

Dampak Publik: Meutya menilai konten tersebut berpotensi memicu provokasi dan memecah belah bangsa.

Pemerintah tidak tinggal diam dan berencana mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan hingga penyebaran video tersebut. Meutya menjelaskan bahwa tindakan ini secara sadar telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan aturan yang berlaku, pihak yang mendistribusikan video tersebut dapat dijerat:

UU ITE No. 1 Tahun 2024 Pasal 27A: Terkait penyerangan kehormatan atau nama baik.

UU ITE Pasal 28 ayat (2): Terkait penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.

Menutup pernyataannya, Komdigi mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat. Pemerintah menekankan bahwa meskipun kebebasan berekspresi dijamin, hal tersebut harus dijalankan tanpa menyebarkan kebencian maupun informasi yang tidak benar demi menjaga persatuan nasional.[]